



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam
Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa
Kidul Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Syifa Fakhirah Daviana

2017310083

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam
Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa
Kidul Kota Bandung**

Skripsi

Oleh

Syifa Fakhirah Daviana

2017310083

Pembimbing

Pius Suratman Kartasmita, Drs., MA., Ph.D.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Syifa Fakhirah Daviana
Nomor Pokok : 2017310083
Judul : Analisis Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam
Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa
Kidul Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Jumat, 06 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

Sekretaris

Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D.

Anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Nama : Syifa Fakhirah Daviana
NPM : 2017310083
Judul : Analisis Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Penanganan
Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Menyatakan bahwa skripsi ini benar – benar merupakan hasil penelitian, pemikiran, penjelasan saya sendiri dan bukan merupakan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Adapun tulisan atau pikiran orang lain yang saya kutip pada skripsi ini, saya akan mencantumkan sumber yang jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan saya bersedia untuk menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bandung, 13 Juli 2021



Syifa Fakhirah Daviana

2017310083

ABSTRAK

Nama : Syifa Fakhirah Daviana
NPM : 2017310083
Judul : Analisis Pelaksanaan *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) adalah virus corona jenis baru yang menyebar dengan sangat cepat menginfeksi manusia. Indonesia merupakan salah satu negara yang terjangkit pandemi Covid-19 dan menetapkan bahwa virus Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia terjangkit virus Covid-19, salah satunya adalah Kota Bandung. Kota Bandung tercatat sebagai kota dengan fluktuasi pasien positif Covid-19 yang signifikan. Pandemi Covid-19 ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, tetapi juga pada sektor lain seperti ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun guna menangani pandemi Covid-19 ini pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerjasama dari sektor swasta dan masyarakat. Kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat ini disebut *collaborative governance*.

Skripsi ini membahas tentang proses *collaborative governance* di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan menggunakan model yang dikemukakan oleh Morse dan Stephens yang terdiri dari empat tahap, yaitu tahap *assessment*, tahap *initiation*, tahap *deliberation* dan tahap *implementation*. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan Camat Bojongloa Kidul Kota Bandung (mewakili pemerintah), Yayasan Harapan Kasih (mewakili CSR), serta Forum Masyarakat (LPM, TP-PKK, Karang Taruna, dan Forum RW). Selain itu penelitian ini juga didukung dengan hasil studi terhadap dokumen-dokumen yang relevan.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses *collaborative governance* di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung masih belum terlaksana sesuai dengan harapan. Dari empat tahap yang dikemukakan Morse dan Stephens, hanya tahap *assessment* dan *initiation* yang telah dilaksanakan dengan baik sedangkan tahap *deliberation* dan *implementation* belum dilaksanakan dengan baik. Hasil analisis menunjukkan indikasi, bahwa proses *collaborative governance* berdampak positif terhadap upaya penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul, baik terhadap upaya pencegahan dan penularan virusnya, maupun terhadap pemulihan ekonomi yang ditimbulkannya. Ada dua rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini; perlunya studi lanjut tentang mengapa tahap *deliberation* dan tahap *implementation* tidak dapat dilaksanakan sesuai harapan.

Kata kunci : *Collaborative Governance, Analisis Stakeholders, Efektivitas Program, Covid-19*

ABSTRACT

Nama : Syifa Fakhirah Daviana
NPM : 2017310083
Judul : *Analysis of the Implementation of Collaborative Governance in Handling the Covid-19 Pandemic in Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung*

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) is a new type of corona virus that spreads very quickly to infect humans. Indonesia is one of the countries affected by the Covid-19 pandemic and has determined that the Covid-19 virus is a non-natural national disaster. Almost all regions in Indonesia have been infected with the Covid-19 virus, one of which is the city of Bandung. The city of Bandung is listed as a city with a significant fluctuation of positive Covid-19 patients. The Covid-19 pandemic has not only had a negative impact on health, but also on other sectors such as the economy. Various efforts have been made by the government, but in order to deal with the Covid-19 pandemic, the government cannot work alone and requires cooperation from the private sector and the community. This collaboration between the government, the private sector and the community is called collaborative governance.

This thesis discusses the collaborative governance process in Bojongloa Kidul District, Bandung City using the model proposed by Morse and Stephens which consists of four stages, namely the assessment stage, initiation stage, deliberation stage and implementation stage. The research method used in this thesis is a descriptive qualitative method. The data used are the results of in-depth interviews conducted with the Head of Bojongloa Kidul, Bandung City (the government), Harapan Kasih Foundation (representing CSR), and the Community Forum (LPM, TP-PKK, Karang Taruna, and RW Forum). In addition, this research is also supported by the results of studies of relevant documents.

The results of this study illustrate that the collaborative governance process in Bojongloa Kidul District, Bandung City has not been implemented as expected. Of the four stages proposed by Morse and Stephens, only the assessment and initiation stages have been carried out properly, while the deliberation and implementation stages have not been carried out properly. The results of the analysis show a strong indication that the collaborative governance process has a positive impact on efforts to deal with the Covid-19 pandemic in Bojongloa Kidul District, both on efforts to prevent and transmit the virus, as well as on the economic recovery it causes. There are two recommendations that can be conveyed from the results of this study; the need for further studies on why the deliberation stage and the implementation stage cannot be carried out as expected.

Keywords : Collaborative Governance, Stakeholder Analysis, Program Effectiveness, Covid-19

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “Analisis *Collaborative Governance* dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung”. Dalam proses penulisan penelitian ini, tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan serta kesulitan yang dialami penulis. Namun berkat saran, nasihat, bimbingan, restu, doa, baik dari kedua orang tua, keluarga, sahabat, teman, serta dosen pembimbing yaitu Pius Suratman Kartasasmita, Drs., M.Si., Ph.D., maka segala hambatan maupun kesulitan itu dapat diatasi.

Pada kesempatan ini juga penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan yang sebesar – besarnya atas segala motivasi, bimbingan, kerjasama, serta ilmu yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UNPAR.
2. Bapak Trisno Sakti Herwanto, MPA. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik beserta staf nya.
3. Seluruh dosen dari Program Studi Administrasi Publik beserta staf Administrasi UNPAR yang sudah banyak membantu penulis dari awal perkuliahan hingga kelulusan.
4. Bapak Drs. Yudy Hermawan Selaku Camat, Pak Rajasa P. Berutu, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Kecamatan lama, beserta para staf dari Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.
5. Ibu Fitri, AMK. selaku perwakilan dari Puskesmas Cibaduyut Kidul Kota Bandung. Terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Bapak Ferry Yadi Hartadinata selaku Sekretaris Yayasan Harapan Kasih Kota Bandung. Terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.
7. Bapak Taufik Rangga Malela selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.
8. Ibu Elis Dedih selaku Ketua Pokja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
9. Bapak Supriatin selaku Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.
10. Bapak Eki Kosasih selaku Ketua Forum RW Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data – data yang dibutuhkan dalam penelitian.
11. Bapak Dadang Munajat, S.T dan Ibu Vivi Savitri Dwiaryanti, S.Sos., M.Si selaku orang tua dari penulis. Terimakasih atas doa, nasihat, motivasi, kasih sayang yang tak terhingga, serta segala hal terbaik yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
12. Bapak Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H dan Ibu Prof. Dr. Hj. Mien Rukmini, S.H., M.H. selaku kakek dan nenek dari penulis. Terimakasih atas segala doa, nasihat, motivasi, kasih sayang, dan segala hal yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
13. Ervanda Fairuz Munajat, selaku adik tercinta dari penulis yang juga memberikan penulis doa, semangat serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Ananda Triirta Chaerany, selaku sahabat terbaik peneliti. Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk senantiasa mendengarkan segala keluhan kesah peneliti selama ini dan senantiasa selalu memberikan motivasi,

semangat, inspirasi serta doa untuk peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

15. Afifah Khoirunnisa, Azda N.S, Kartika Novadiana, Shinta Refta, selaku sahabat – sahabat tercinta penulis yang sudah bersama – sama merasakan senang, sedih, kesal, marah, segala keluh dan kesah dengan penulis sejak pertama kali menginjakkan kaki di UNPAR (ospek) hingga kelulusan penulis. Terimakasih atas segala keanehan, keunikan, kerecehan, kebaikan, canda, tawa, air mata, kasih sayang, dan segala ceritanya yang memberikan kenangan yang berwarna di masa perkuliahan penulis.
16. Muhamad Arriq Purwandi, selaku teman tercinta penulis. Terimakasih atas segala waktu, doa, motivasi, semangat, dan bantuannya juga atas kesabarannya dalam proses penelitian. Terimakasih telah selalu siap siaga ditengah kesibukannya untuk selalu ada bagi penulis, memberikan segala perhatian, dan menjaga penulis dari segala aspek sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
17. Eldo Tria Fadji, selaku teman seperjuangan penulis semasa kuliah. Terimakasih telah banyak membantu peneliti baik dari segi akademik maupun menjaga semangat peneliti selama perkuliahan, terimakasih sudah bersedia menjadi teman ambis selama perkuliahan dan kuliner peneliti.
18. Teman – teman satu bimbingan, Hendrika, Odang, Billy, Oci, dan Jeni. Terimakasih sudah menjadi teman untuk berdiskusi dan memberikan motivasi dalam proses pengerjaan penelitian ini dari awal hingga menyelesaikan penelitian ini.
19. Teman – teman Administrasi Publik angkatan 2017 yang senantiasa membantu dan mengisi hari – hari peneliti diperkuliahan sampai kelulusan.
20. Teman – teman seperjuangan penulis dari Grup Calon Orang Sukses (COS), Adhif, Bani, Kamila, Yustika, Yulia, Amel, Anjar, Bobo, Nina. Terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk senantiasa mendengarkan segala keluh kesah penulis, yang dengan sukarela selalu memberikan bantuan, serta selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

21. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu yang juga telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademisi dan para pembaca.

Bandung, 13 Juli 2021

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syifa Fakhirah Daviana', written in a cursive style.

Syifa Fakhirah Daviana

2017310083

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Fokus Penelitian	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Kegunaan Penelitian	14
1.5. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	17
2.1. Konsep <i>Governance</i>	17
2.2. Identifikasi dan Analisis <i>Stakeholders</i>	20
2.3. Konsep <i>Collaborative Governance</i>	21
2.2.1. Definisi <i>Collaborative Governance</i>	21
2.2.2. Tujuan Pelaksanaan <i>Collaborative Governance</i>	22
2.2.3. Tipe <i>Collaborative Governance</i>	23
2.2.4. Proses <i>Collaborative Governance</i>	25
2.3. Model Penelitian.....	31
BAB III.....	32
3.1. Tipe Penelitian.....	32
3.2. Peran Peneliti	33
3.3. Lokasi Penelitian	34
3.4. Sumber Data.....	35

3.5. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
3.6. Analisis Data.....	39
3.7. Pengecekan Keabsahan Temuan.....	40
BAB IV.....	46
4.1. Penjelasan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	46
4.2. Peraturan Terkait Kolaborasi Dalam Penanganan Pandemi Covid-19	52
4.3. Profil Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....	55
4.3.2. Peta Wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....	56
4.3.3. Peta Administrasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....	57
4.4. Identifikasi <i>Stakeholders</i> yang Terlibat Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....	57
4.4.2. Pemerintah.....	57
4.4.2. Swasta.....	59
4.4.3. Masyarakat.....	60
4.7. Kegiatan yang Dilaksanakan <i>Stakeholders</i> dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....	78
BAB V.....	79
5.1. Analisis Proses <i>Collaborative Governance</i> Menurut Morse dan Stephens	80
5.1.1. Tahap 1 : <i>Assessment</i>	81
5.1.2. Tahap 2 : <i>Initiation</i>	90
5.1.3. Tahap 3 : <i>Deliberation</i>	101
5.1.4. Tahap 4 : <i>Implementation</i>	108
5.3. Hambatan Dalam Proses <i>Collaborative Governance</i>	124
BAB VI.....	129
6.1. Kesimpulan.....	129
6.2. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

LAMPIRAN.....	141
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 - Data Warga Miskin (PKM) di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>8</i>
<i>Gambar 2 - Aktor Governance (Abidin Dkk, 2013).....</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 3 - Model Collaborative Governance (Morse & Stephens, 2012).....</i>	<i>25</i>
<i>Gambar 4 - Model Penelitian Analisis Pelaksanaan Collaborative Governance Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>31</i>
<i>Gambar 5 - Peta Wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>56</i>
<i>Gambar 6 - Peta Administrasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>57</i>
<i>Gambar 7 - Struktur Organisasi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>59</i>
<i>Gambar 8 - Struktur Organisasi Yayasan Harapan Kasih (CSR).....</i>	<i>60</i>
<i>Gambar 9 - Identifikasi Stakeholders Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>91</i>
<i>Gambar 10 - Peran Stakeholders Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>96</i>
<i>Gambar 11 - Pelaksanaan Penyemprotan Cairan Disinfektan Secara Berkala di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>110</i>
<i>Gambar 12 - Pelaksanaan Pembagian Masker Gratis Kepada Masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>112</i>
<i>Gambar 13 - Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Terinfeksi Virus Covid-19 dan Menerapkan Protokol Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>113</i>
<i>Gambar 14 - Pelaksanaan Pembagian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>115</i>
<i>Gambar 15 - Pelaksanaan Pembagian Vaksin Covid-19 Bagi Masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>117</i>
<i>Gambar 16 - Data Pasien Positif Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>120</i>

Gambar 17 - Data Warga Miskin (PKM) di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....121

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1 - Kriteria Zonasi Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 2 - Data Persebaran RT dan RW di Kecamatan Bojongloa Kidul Berdasarkan Kelurahan.....</i>	<i>56</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan publik yang saat ini sedang terjadi ialah pandemi Covid-19. *Corona Virus Disease 2019* atau disingkat Covid-19 ialah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang berasal dari golongan *coronavirus*, yaitu *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-Cov-2). Covid-19 menular antar manusia melalui *droplets* (percikan air ludah) dari orang yang terinfeksi Covid-19. Covid-19 menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan dari mulai gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru – paru seperti *pneumonia*.¹ Kasus pertama pasien Covid-19 ditemukan di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019.² Karena penularan antar manusia yang sangat cepat, *World Health Organization* (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi.³ Hal ini dikarenakan dalam kurun waktu beberapa bulan saja, Covid-19 telah menginfeksi hampir seluruh negara di seluruh dunia.

Indonesia merupakan negara dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara.⁴ Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 ini, dimulai dari himbauan untuk memakai masker saat hendak keluar rumah, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, menjaga jarak aman antar manusia (*physical distancing*), hingga membuat kebijakan. Sejak pasien pertama yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia diumumkan pada 15 Maret 2020 lalu, pasien yang terkonfirmasi positif terus

¹ Alodokter.com. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Artikel : COVID-19*. <https://www.alodokter.com/covid-19> (diakses pada 9 September 2020, pukul 19:21 WIB)

² World Health Organization (WHO), *Artikel : Pertanyaan dan Jawaban terkait Coronavirus*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> (diakses pada 9 September 2020, pukul 20:07 WIB)

³ COVID-19.go.id. *Tanya Jawab : Apa Yang Dimaksud Dengan Pandemi?*. <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> (diakses pada 9 September 2020, pukul 20:33 WIB)

⁴ CNN Indonesia. Akbar Nugroho Gumay. *Berita : Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Tertinggi di Asia Tenggara*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201220070650-106-584308/kasus-aktif-covid-19-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara> (diakses pada 22 Desember 2020, pukul 20:48 WIB)

bertambah dari waktu ke waktu. Hingga saat ini tercatat sudah lebih dari 700.000 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia.⁵

Penularannya yang sangat cepat mengakibatkan pemerintah harus bergerak lebih cepat untuk menangani adanya pandemi Covid-19 ini. Untuk itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab pandemi Covid-19 saat ini bukan hanya berakibat pada kesehatan manusia saja, tetapi juga berdampak pada sektor lainnya, seperti ekonomi. Perekonomian merupakan salah satu sektor yang terdampak cukup besar akibat pandemi Covid-19. Berbagai aktivitas atau kegiatan bisnis terpaksa dihentikan atau bahkan ditutup untuk menangani Covid-19. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).⁶ Banyak masyarakat yang akhirnya menjadi pengangguran ditengah pandemi Covid-19. Perekonomian masyarakat yang memburuk berdampak pula kepada perekonomian negara. Maka pandemi Covid-19 Oleh karena itu, dalam menangani pandemi Covid-19 ini pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama dengan melibatkan pihak lain diluar pemerintah.

Kerjasama antara pemangku kepentingan dengan melibatkan pemerintah dengan sektor non-pemerintah ini disebut *collaborative governance*. *Collaborative governance* merupakan sebuah konsep yang muncul seiring dengan pergeseran dari paradigma tata kelola pemerintahan dari *government* ke *governance*. Pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan dari *government* ke *governance* ini kemudian menggeser lokus dari pemerintah yang terpusat menjadi melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) didalam tata kelola pemerintahan. Jika sebelumnya peran pemerintah pada paradigma *government* adalah sebagai provider serta pelaksana dari program dan kegiatan, pada paradigma *governance* ini peran pemerintah berpindah menjadi lebih fokus sebagai fungsi regulator dan fasilitator.

⁵ DetikHealth. AN Uyung Pramudiarja. *Berita : Update Corona Indonesia 5 Januari : Tambah 7.445, Total Positif 779.548 Kasus*. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5321896/update-corona-indonesia-5-januari-tambah-7445-total-positif-779548-kasus> (diakses pada 5 Januari 2021, pukul 20:59 WIB)

⁶ Tempo Bisnis. Dewi Rina Cahyani. *Berita : Dampak Corona, 3,05 Juta Orang Terkena PHK Hingga Juni*. <https://bisnis.tempo.co/read/1350955/dampak-corona-305-juta-orang-terkena-phk-hingga-juni> (diakses pada 9 Juni 2020, pukul 12:41 WIB)

Pada konsep *governance*, pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan publik, tetapi dengan melibatkan peran dari pihak lain diluar pemerintah, yaitu sektor privat dan masyarakat guna menyelesaikan permasalahan publik serta meningkatkan kepuasan layanan kepada masyarakat melalui suatu kebijakan. Artinya, ada bentuk kerja sama diantara pemangku kepentingan diantara sektor publik (pemerintah), sektor privat, dan masyarakat didalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat membuat sektor publik bekerja menjadi lebih efisien dan efektif.

Collaborative governance dalam Bahasa Indonesia, dikenal sebagai kolaborasi atau kemitraan pemerintah. Kolaborasi ialah suatu bentuk dari proses sosial, yang terdiri dari aktivitas – aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dengan cara saling memahami serta saling membantu aktivitas masing – masing.⁷ Menurut Schrage, kolaborasi ialah upaya penyatuan dari berbagai pihak guna mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai aktor (individu atau organisasi) yang saling bahu-membahu dalam mengerjakan tugas demi tercapainya suatu tujuan bersama. Menurut Fendt, terdapat tiga alasan yang mendasari organisasi untuk melakukan kolaborasi, diantaranya :⁸

- a. Organisasi membutuhkan kolaborasi sebab tidak dapat menyelesaikan persoalan tertentu sendiri tanpa bantuan dari pihak lain.
- b. Organisasi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan berkolaborasi dibandingkan dengan bekerja sendiri.
- c. Organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk mereka dapat menjadi lebih murah serta memiliki daya saing di pasar.

Berdasarkan definisi dari kedua ahli tersebut, dikehauti bahwa mulanya organisasi ialah otonom, lalu terdapat keterbatasan dalam mencapai sebuah tujuan.

⁷ Abdulsyani. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1994). Halaman 159

⁸ Fendt, Thomas Christian. *Introducing Electronic Suplly Chain Collaboration In China; Evidence From Manufacturing Industries*. (Berlin : Universitatsverlag Der Technischen Universitat Berlin, 2010). Halaman 22

Kebutuhan dalam mencapai tujuan itulah yang menjadi latar belakang organisasi melakukan kerjasama dengan individu atau organisasi lain.⁹

Sedangkan O'Flynn dan Wanna menjelaskan kolaborasi sebagai bekerja secara bersama atau berkerjasama dengan orang lain.¹⁰ Ansell dan Gash lantas menjelaskan *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan dalam pemerintahan yang dimana satu atau lebih dari lembaga publik secara langsung melibatkan para *stakeholders* (pemangku kepentingan) diluar pemerintah dalam proses pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dengan tujuan untuk membuat serta menerapkan kebijakan publik dan mengelola program maupun aset publik.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan, *collaborative governance* ialah bentuk dari kerjasama, saling berkompromi (secara langsung atau tidak), yang melibatkan sektor pemerintah, non-pemerintah, serta masyarakat. Kemudian hasil dari kolaborasi tersebut akan mendapatkan manfaat dan akibat serta berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah. Saat ini sudah banyak negara maju yang mempraktekan konsep *collaborative governance*. Karena konsep *collaborative governance* ini dianggap penting untuk diterapkan guna mengatasi berbagai permasalahan yang sulit untuk diselesaikan sendiri.

Kolaborasi dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebagaimana tertulis pada Pasal 13 bahwa komite dalam penanganan Covid-19 dalam pelaksanaan tugasnya ini dapat melibatkan kementerian, lembaga, instansi, pemerintah daerah, badan usaha, ahli, akademisi, dan pihak lain yang diperlukan.¹²

Mengacu pada peraturan tersebut, kemudian di implementasikan oleh pemerintah daerah Kota Bandung melalui Peraturan Walikota Bandung Nomor 13

⁹ Raharja, Sam'un Jaja. *Model Kolaborasi Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum*. (Disertasi Program Doktor Ilmu Administrasi Publik, Depok : Universitas Indonesia, 2008). Halaman 8

¹⁰ O'Flynn, Janine dan Wanna, John. *Collaborative Governance: A New Era of Public Policy in Australia*. (Australia : The Australian National University (ANU) - E PRESS, 2008) Halaman 3

¹¹ Afful-Koomson, T, dan Kwabena O. A. *Collaborative Governance in Extractive Industries in Africa*. (Africa: Pixedit Limited, 2013) Halaman 13

¹² Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*. Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota 13/2020 ini diantaranya :¹³

- a. Mencegah dan mengatasi penyebaran dan penularan Covid-19 secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- b. Mempercepat penanggulangan, penyelesaian, dan pengakhiran wabah Covid-19 di Daerah Kota.
- c. Menurunkan jumlah kasus Covid-19.
- d. Menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19.
- e. Mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.
- f. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, tenaga kesehatan, dan aparatur penyelenggara pemerintahan.

Pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2020 disebutkan bahwa dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus dilakukan kerja sama dan koordinasi. Dimana Walikota berwenang untuk melakukan koordinasi serta optimalisasi potensi sumber daya seperti Instansi/Lembaga baik pemerintah dan/atau swasta yang ada di Daerah Kota. Hal tersebut tercatat dalam Bab XI Pasal 30 tentang kerja sama dan kemitraan disebutkan bahwa pemerintah daerah kota harus melakukan kemitraan baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor lain diluar pemerintah.

Dalam Pasal 30 Peraturan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2020 juga dituliskan bahwa kemitraan yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi berupa keuangan, kajian, teknologi, fasilitas kesehatan, kendaraan, dan bantuan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah kota dalam rangka menangani pandemi Covid-19. Ini menjelaskan bahwa dalam penanganan pandemi Covid-19 harus menggunakan pendekatan *collaborative governance*. Sebab penanganan pandemi Covid-19 ini adalah permasalahan yang menjadi kepentingan dan juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bahkan konsep kolaborasi ini termasuk kedalam misi Kota

¹³ Peraturan Walikota Bandung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*

Bandung yang kelima, yaitu mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi.

Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tersebut kemudian diimplementasikan oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung melalui Keputusan Camat Bojongloa Kidul Nomor : 400/Kep.019–Kec. BOJKID/XII/2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat yang memiliki konteks kewilayahan.¹⁴ Artinya, dalam sistem penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan dipandang sebagai salah satu Perangkat Daerah dari Kabupaten/Kota dan sekaligus berperan sebagai penyelenggara pemerintahan umum. Kabupaten/Kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Kelurahan/Desa. Kecamatan juga merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran kecamatan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian dampak Covid-19 sangat diperlukan.

Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dipilih peneliti dalam meneliti pelaksanaan *collaborative governance* dalam penanganan pandemi Covid-19 sebab pada saat penelitian ini dilakukan, bulan November 2020 Kecamatan Bojongloa Kidul ini merupakan kecamatan dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tertinggi di Kota Bandung.¹⁵ Bahkan pada bulan November 2020 terjadi kenaikan kasus aktif positif Covid-19 di Kota Bandung dan merupakan penambahan kasus aktif positif Covid-19 paling tinggi sejak kemunculan Covid-19 di Kota Bandung.¹⁶

¹⁴ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ PRFM News. Indra Kurniawan. “Data Terkini Sebaran Corona Kota Bandung, Bojongloa Kidul Penyumbang Kasus Positif Aktif Terbanyak”. <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-131019626/data-terkini-sebaran-corona-kota-bandung-bojongloa-kidul-penyumbang-kasus-positif-aktif-terbanyak> (diakses pada 30 November 2021, pukul 11.48 WIB)

¹⁶ Ayo Bandung. Nur Khansa Ranawati. *Berita : Rekor Baru, Kasus Aktif Covid-19 Bandung Naik 139 dalam Sehari*. <https://www.ayobandung.com/bandung/pr-79705363/rekor-baru-kasus-aktif-covid-19-bandung-naik-139-dalam-sehari> (diakses pada 30 November 2020, pukul 13.09 WIB)

Berdasarkan peraturan – peraturan yang terkait dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sebelumnya, peneliti menyimpulkan dan mendapatkan hipotesa awal bahwa kolaborasi yang dilakukan Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam penanganan Pandemi Covid-19 ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dari :

1) Fluktuasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19

Sejak pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia diumumkan pada bulan Maret 2020 silam hingga saat ini, masih terjadi fluktuasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19. Masalah ini juga terjadi khususnya di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Sejak bulan Maret 2020 hingga Juni 2021, tercatat bahwa ada 1.041 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan angka kematian hingga 23 pasien.¹⁷ Berdasarkan data tersebut dapat dibuktikan bahwa pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul masih belum bisa teratasi. Jika dilihat dari tabel diatas, bahkan pada bulan Juni 2021 pasien terkonfirmasi positif Covid-19 berada di angka 170 pasien dan menjadi bulan dengan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 paling tinggi diantara bulan – bulan sebelumnya. Padahal pandemi Covid-19 sudah mewabah lebih dari satu tahun dan proses kolaborasi antar sektor dalam menangani pandemi ini telah dilakukan sejak bulan Maret 2020. Hal ini menjadi suatu masalah bagi masyarakat karena pandemi Covid-19 mengancam kesehatan manusia.

Jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung ini tersebar di seluruh kelurahannya. Jika dilihat berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri 11/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat

¹⁷ Dokumen Puskesmas Surveilans Kasus Covid-19 Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2020 – 2021

RT pada periode Mei sampai Juni 2021, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung termasuk pada zona :¹⁸

No.	Kelurahan	RW	RT	Jumlah Kasus Konfirmasi Covid-19	Status RT
1.	Situsaeur	17	25	28	Kuning
2.	Kebonlega	20	37	44	Kuning
3.	Cibaduyut	7	11	14	Kuning
4.	Cibaduyut Kidul	4	7	8	Kuning
5.	Cibaduyut Wetan	2	2	3	Kuning
6.	Mekarwangi	5	8	15	Merah

Tabel 1 - Kriteria Zonasi Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

2) Dampak ekonomi dari fluktuasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19

Fluktuasi yang terjadi pada pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung ini selain berdampak buruk bagi kesehatan masyarakatnya, juga berdampak negative terhadap sektor perekonomiannya. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau disebut juga sebagai Keluarga Miskin di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung :¹⁹



Gambar 1 - Data Warga Miskin (PKM) di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung

¹⁸ Dokumen Puskesmas Surveilans Kasus Covid-19 Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2020 – 2021

¹⁹ Dokumen Tabulasi dan Visualisasi Data Kesos Kecamatan Bojongloa Kidul Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah warga miskin yang tercatat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung sejak tahun 2019 hingga 2021. Pertambahan warga miskin di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dari tahun 2019 hingga 2021 ini merupakan salah satu dari dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Peningkatan yang paling signifikan terjadi dari tahun 2019 ke 2020, terdapat selisih peningkatan jumlah warga miskin sebanyak 257 keluarga. Perbandingan antara tahun 2019 sebelum adanya wabah pandemi Covid-19 dengan tahun 2020 setelah terjadi pademi Covid-19. Kemudian pada selanjutnya pada tahun 2021, dimana sudah kurang lebih satu tahun pandemi Covid-19 mewabah ini juga terjadi peningkatan jumlah warga miskin sebanyak 110 warga dibandingkan dengan tahun 2020.

3) Hanya 1 pihak swasta yang berkolaborasi secara kontinyu

Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung terkait Data CSR Untuk Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2020, tercatat bahwa Kecamatan telah menerima 38 kali bantuan CSR dari berbagai perusahaan maupun organisasi swasta yang berada di wilayah Kecamatan.²⁰ Namun dilihat dari dokumen tersebut, hanya ada 1 perusahaan swasta yang konsisten dalam memberikan bantuan CSR dalam penanganan pandemi Covid-19 ini yaitu Yayasan Harapan Kasih. Sedangkan sisanya hanya memberikan bantuan CSR antara 1-2 kali saja selama tahun 2020 - 2021.

4) Partisipasi masyarakat yang rendah

Kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah selain melibatkan sektor swasta juga membutuhkan partisipasi masyarakat setempat. Tetapi partisipasi masyarakat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung relatif rendah. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Camat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota

²⁰ Dokumen Data *Corporate Social Responsibility (CSR)* Untuk Covid-19 Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2020 - 2021

Bandung bahwa partisipasi masyarakat setempat dalam menangani pandemi Covid-19 ini tergolong rendah.²¹ Sebab dari berbagai program penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan partisipasi masyarakat seperti menerapkan protokol kesehatan. Dalam penertiban penerapan protokol kesehatan di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung ini masih banyak pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak memakai masker medis, tidak menjaga jarak aman antar manusia 1-2 meter, berkerumun, dan lainnya.²² Ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat terkait penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung masih rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance* yang dilakukan oleh *stakeholders* belum mencapai tujuannya. Tujuan dari terlaksananya kolaborasi ini adalah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dari segi kesehatan, perbaikan ekonomi, sosial, dan lainnya. Menurut Huxam dan Herbert, salah satu alat ukur keberhasilan dari *collaborative governance* ialah dengan tercapainya tujuan dari penerapan konsep *collaborative governance* itu.²³ Dari bukti permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penyebab dari belum tercapainya tujuan *collaborative governance* dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung ini diantaranya :²⁴

1. Sulitnya berkoordinasi ditengah pandemi.

Salah satu tindakan preventif yang bisa dilakukan selama pandemi Covid-19 ini yaitu dengan melakukan *physical distancing*. *Physical distancing* adalah sebuah upaya yang dapat dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona dimasyarakat dengan menjaga jarak yang lebih dari 1 meter dengan manusia lain (tidak berkumpul atau berdekatan). Penerapan *physical*

²¹ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pak Rajasa Selaku Sekretaris Camat di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung pada 15 Desember 2020

²² Dokumen Kegiatan Satgas Covid-19 Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung Tahun 2021

²³ Huxam, C dan Paul Herbert. *Hit or myth? Stories of collaborative success*. J O'Flynn dan John W. *Collaborative Governance : A New Era of Public Policy In Australia*. (Australia : E Press, 2008) Halaman 45

²⁴ Hasil Wawancara Peneliti Dengan Sekretaris Kecamatan Pada 16 Desember 2020

distancing ini mengakibatkan *stakeholders* menjadi sulit untuk berkomunikasi. Sehingga koordinasi antar *stakeholders* pun sulit dilakukan secara langsung, harus melalui daring atau *online*. Walaupun koordinasi dilaksanakan secara langsung seperti rapat koordinasi *stakeholders*, tetapi tidak banyak *stakeholders* yang bisa terlibat.

2. Kurangnya peran aktif dari para *stakeholders*.

Penyebab yang pertama memiliki dampak terhadap penyebab yang kedua. Sebab, sulitnya koordinasi yang dilakukan antar *stakeholders* ini mengakibatkan kurangnya peran aktif dari *stakeholders*. Hal ini dibuktikan seperti halnya tempat cuci tangan umum, baik Kecamatan, perusahaan (pemberi bantuan CSR), maupun masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam menjaga tempat cuci tangan umum yang telah dibangun tersebut. Padahal tempat cuci tangan merupakan salah satu unsur penting dalam penanganan pandemi Covid-19 sebagai tindakan preventif membunuh virus yang mungkin ada di tangan.

Ditinjau dari permasalahan beserta penyebab pelaksanaan kolaborasi dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung berdasarkan hipotesa tersebut yang berasal dari wawancara dan studi dokumen yang peneliti lakukan, peneliti tertarik melihat bagaimana proses pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam menangani pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Sebab dalam kasus ini, fluktuasi pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang terjadi selama lebih dari setahun sejak pandemi Covid-19 diumumkan terjadi di Indonesia, berdampak negative pula khususnya pada sektor perekonomian. Jika permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti dengan memutus rantai persebaran virus Covid-19 di Kota Bandung khususnya di Kecamatan Bojongloa Kidul, maka dampak negative yang ditimbulkan dari wabah Covid-19 ini akan bertambah dan menyebar di sektor lainnya selain kesehatan dan ekonomi.

Inilah yang menjadi urgensi pemerintah untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain (swasta dan masyarakat) guna mempercepat memutus rantai

persebaran virus Covid-19 dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Sebab dalam menangani pandemi Covid-19 ini, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dan harus melibatkan pihak – pihak lain seperti sektor swasta dan masyarakat. Pelibatan berbagai *stakeholders* ini disebut sebagai *collaborative governance*. Maksud dari pelaksanaan *collaborative governance* ini ialah guna menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Mengingat pandemi Covid-19 ini merupakan sebuah masalah yang terjadi secara mendadak dan tiba – tiba, dimana pemerintah tidak mempersiapkan segala kebutuhan untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kolaborasi dengan pihak/sector lain yang dianggap perlu dalam menangani pandemi Covid-19 ini.

Pelaksanaan *collaborative governance* ini dilakukan sebab pemerintah menghadapi keterbatasan dalam menangani pandemi Covid-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pihak lain. Keterbatasan yang dialami oleh pemerintah ini meliputi sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan lain sebagainya yang mendukung dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, pemerintah yakni dari Kecamatan melakukan kolaborasi dengan memanfaatkan pihak swasta dan masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung untuk berkerjasama dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 ini. Namun dalam pelaksanaan *collaborative governance* di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, masih terdapat kendala yaitu tidak semua *stakeholders* berkontribusi secara konsisten dalam berkolaborasi dengan pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19. Selain itu juga, partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah guna menangani pandemi Covid-19 ini masih dianggap rendah. Ini yang menjadi perhatian peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Pada proses penyusunan penelitian ini, peneliti menemukan berbagai penelitian yang serupa terkait analisis *collaborative governance*. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya yang serupa ialah terletak pada fenomena

penelitian. Dimana penelitian ini berfokus pada permpenanganan pandemi Covid-19 yang

Oleh karena itu, berdasarkan dengan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai proses pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 dan faktor apa saja yang perlu diperkuat serta diperbaiki dalam upaya meningkatkan penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan *collaborative governance*.

1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, maka bahwa kolaborasi dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung adalah sebagai upaya untuk memutus rantai persebaran Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung secepatnya. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses *collaborative governance* antar *stakeholders* dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung?
2. Apa faktor yang perlu diperkuat dan diperbaiki dalam proses kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholders* dalam guna memperbaiki penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung?
3. Apakah pelaksanaan *collaborative governance* terdapat indikasi dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dengan dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui :

1. Untuk mendeskripsikan sejauh mana keberhasilan proses *collaborative governance* yang dilakukan oleh *stakeholders* dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka memutus rantai persebaran Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

2. Untuk mengidentifikasi apa saja faktor dari *collaborative governance* yang bisa diperkuat dan diperbaiki untuk mengoptimalkan penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka memutus rantai persebaran Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bahwa hasil dari kolaborasi yang dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut terdapat indikasi dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, penelitian ini kemudian diharapkan dapat memiliki manfaat baik dalam pendidikan secara langsung (formal) dan tidak langsung (informal). Adapun kegunaan atau manfaat dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, khususnya untuk mahasiswa Ilmu Administrasi Publik sebagai sumber informasi dan pembelajaran mengenai pendekatan *collaborative governance*.
- b) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan bagi peneliti – peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sejenis guna meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan suatu masalah khususnya terkait *collaborative governance*.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang pendidikan dengan menambah sumber pengetahuan bagi pelajar mengenai *collaborative governance*.

2. Manfaat praktis

Sedangkan secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19

di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengevaluasi serta memperbaiki proses kolaborasi antar *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) agar tujuan daripada kolaborasi itu tercapai dan kolaborasi dikatakan berhasil. Khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan berisi rincian mengenai urutan dari penulisan dari mulai Bab I sampai dengan Bab VI.

Bab I akan berisi uraian mengenai pendahuluan serta merupakan bagian awal pada penelitian ini. Bab I penelitian ini akan dimulai dari latar belakang penelitian yang lebih menekankan kepada penjelasan mengenai permasalahan yang ditemui oleh peneliti dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan menggunakan konsep *collaborative governance* dan hendak dianalisis lebih lanjut. Dari penjabaran tersebut lantas muncul fokus penelitian yang berisi tentang rumusan masalah penelitian ini. Lalu akan diikuti dengan tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan pada penelitian ini.

Bab II akan berisi uraian mengenai kerangka teori serta kerangka penelitian. Kerangka teori ini memiliki peran yang penting dalam penelitian ini, sebab kerangka teori berfungsi sebagai landasan teori dalam menyusun pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan kerangka penelitian. Bab II penelitian ini terdiri dari pembahasan teori dan konsep beserta turunannya yang berkaitan dengan bidang yang dikaji oleh peneliti. Kerangka teori yang tercantum di Bab II ini merupakan cara peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian di Bab I sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori *collaborative governance*.

Bab III akan berisi uraian mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian, yang terdiri dari tipe penelitian, peran peneliti,

lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, serta operasionalisasi variabel.

Bab IV akan berisi uraian mengenai profil penelitian. Bab ini akan berisi mengenai seluruh profil *stakeholders* yang menjadi subjek pada penelitian ini. Dimana dalam Bab IV akan berisi tentang segala hal yang dibutuhkan mengenai profil Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung beserta seluruh profil *stakeholders* yang terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19 di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.

Bab V akan berisi uraian mengenai pembahasan. Bab V merupakan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti dilapangan. Hasil penelitian adalah murni berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan. Serta kemudian akan dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian dengan teori yang digunakan peneliti terkait proses *collaborative governance*.

Bab VI akan berisi mengenai kesimpulan dan saran. Penarikan kesimpulan pada bab ini akan didasarkan pada permasalahan serta temuan peneliti. Kesimpulan ini akan meringkas hasil yang ditemukan peneliti pada saat melakukan penelitian. Setelah mendapatkan kesimpulan, lalu peneliti memberikan saran terhadap fenomena yang terjadi di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dalam penanganan pandemi Covid-19.